

## SINOPSIS

Kota Bontang merupakan salah satu kota yang berada di Kalimantan Timur atau Kaltim. Kota Bontang memiliki empat pilar pembangunan kota dicanangkan yakni Bontang Cerdas Tahun 2010, Bontang Sehat Tahun 2008, Bontang Lestari dan Bontang Bebas kemiskinan Tahun 2020.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Program Bontang Sehat 2008 (Studi Kasus Program JPK-PPK/Askeskin). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Dinkes Kota Bontang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis dengan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dalam rangka pencapaian MDGs, Kota Bontang telah berhasil dengan Program Bontang Sehat 2008 khususnya untuk Program JPK-PPK/Askeskin. Pada tahun 2008 Kota Bontang akan mengembangkan Pilot Project dokter keluarga bagi peserta JPK-PPK/Askeskin di setiap desa. Pembiayaan dokter keluarga diambil dari biaya kapitasi penduduk miskin untuk pelayanan kesehatan di puskesmas yang didapatkan dari pemerintah pusat. Inovasi Pelayanan Kesehatan dilakukan guna akselerasi pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, menurunkan angka kematian, menurunnya angka kesakitan dan meningkatnya pelayanan kesehatan. Inovasi pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan efektif ketika program-program tersebut muncul berdasar kebutuhan dan data yang ada di masyarakat.

Keberhasilan dan pencapaian dari pelaksanaan Program JPK-

PPK/Askeskin dapat dilihat dari indikator-indikator: Penerbitan dan pendistribusian kartu peserta 100%, Angka utilisasi (*visit rate*) rata-rata 15% perbulan, Angka rujukan dari PPK I rata-rata 12% perbulan, Rata-rata lama perawatan di RS (LOS) 7 hari, Tingkat kepuasan konsumen minimal 70%, Cakupan pemeriksaan kehamilan K4 (100%) persalinan nakes (100%), dan perawatan bayi baru lahir KN2 (100%) oleh petugas kesehatan.

Kantor Dinkes Kota Bontang sesuai dengan substansi dan implikasi yang ada, telah sepenuhnya mengimplementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 417/Menkes/SK/IV/2007 tentang pedoman pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin, yaitu adanya masyarakat yang secara ekonomi mampu diikutsertakan dalam kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin (JPK-PPK) sehingga sasaran program sesuai target yang diinginkan, yakni masyarakat miskin yang mempunyai kendala dalam pembiayaan pemeliharaan kesehatan baik di Puskesmas maupun di instansi rumah sakit. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yaitu validasi dokumentasi kepesertaan sehingga menyebabkan indikasi program kadang-kadang tidak tepat sasaran.

**Kata kunci:** MDGs, Bontang Sehat 2008, JPK-PPK/Aseskin